
Analisis Kepentingan Uni Eropa di Teluk Guinea Melalui Strategi Coordinated Maritime Presences (CMP) Tahun 2019-2022

Ni Komang Lia Lestari¹⁾, Adi Putra Suwecawangsa²⁾, I Made Anom Wiranata³⁾

^{1,2,3)} Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

Abstrak

Permasalahan keamanan maritim yang terjadi di Teluk Guinea faktanya tidak hanya berdampak pada wilayah regional Afrika Barat saja melainkan juga berpengaruh pada dunia, tak terkecuali Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang sadar akan keamanan maritim memberikan strateginya melalui *Coordinated Maritime Presences* (CMP). Tulisan ini kemudian, menganalisis tentang kepentingan yang dimiliki Uni Eropa di Teluk Guinea melalui strategi *Coordinated Maritime Presences* (CMP). Penelitian ini menggunakan teori Neoliberal Institutionalisme, konsep organisasi internasional dan konsep *collective interest* untuk menganalisis kepentingan kolektif yang dimiliki Uni Eropa di Teluk Guinea. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti menemukan kepentingan kolektif Uni Eropa adalah kepentingan keamanan, perdagangan, dan energi. Kepentingan keamanan sendiri merupakan akar dari kepentingan kolektif Uni Eropa di Teluk Guinea. Kepentingan keamanan berkaitan dengan upaya Uni Eropa dalam meningkatkan citranya sebagai organisasi internasional yang handal dan tangguh dalam keamanan maritim. Kepentingan keamanan juga berkaitan erat dengan aktivitas penyelundupan narkoba jenis kokain dari Afrika Barat menuju Eropa. Kepentingan perdagangan Uni Eropa berkaitan dengan aktivitas pelayaran dan ekspor-impor Uni Eropa di kawasan Teluk Guinea. Perusahaan pelayaran negara-negara Uni Eropa masuk dalam jajaran lima besar perusahaan pelayaran yang beroperasi di Teluk Guinea dengan peningkatan pangsa pasar sebesar 20% dari tahun 2010 sampai 2020. Selanjutnya, isu pembajakan di Teluk Guinea menjadi ancaman utama bagi kerugian kepentingan energi Uni Eropa, di mana sebagian besar target pembajakan adalah kapal-kapal yang mengangkut minyak dan gas. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kepentingan energi Uni Eropa untuk menjadikan Teluk Guinea sebagai *alternative supplier energy* Uni Eropa.

Kata Kunci : *Collective Interest*, Keamanan Maritim, Teluk Guinea, Uni Eropa

Abstract

Maritime security problems that occurred in the Gulf of Guinea did not only affect the West African region but also affected the world, including the European Union. The European Union as an international organization that is aware of maritime security provides its strategy through Coordinated Maritime Presences (CMP). This paper aims to analyze the interests of the European Union in the Gulf of Guinea through the Coordinated Maritime Presences (CMP) strategy. This study uses the theory of Neoliberal Institutionalism, the concept of international organizations, and the concept of collective interest to analyze the collective interests of the European Union in the Gulf of Guinea. By using qualitative research methods,

researchers found that the European Union's collective interests are security, trade, and energy interests. Security interests are the roots of the European Union's collective interests in the Gulf of Guinea. Security interests relate to the European Union's efforts to enhance its image as a reliable and tough international organization in maritime security. Security interests are also closely related to the smuggling of cocaine from West Africa to Europe. The European Union's trade interests are related to the European Union's shipping and export-import activities in the Gulf of Guinea region. Shipping companies from European Union countries are included in the top five shipping companies operating in the Gulf of Guinea with an increase in market share of 20% from 2010 to 2020. Furthermore, the issue of piracy in the Gulf of Guinea is a major threat to the loss of European Union energy interests, where most of the piracy targets are ships transporting oil and gas. This can be a threat to the European Union's energy interests to make the Gulf of Guinea an alternative EU energy supplier.

Key Words: *Collective Interest, European Union, Gulf of Guinea, Maritime Security*

Kontak Penulis

Ni Komang Lia Lestari

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jln. Gunung Abang, Lodtunduh, Ubud, Gianyar

Telp: +6285903626580 Fax:-

E-mail : komang.lia@student.unud.ac.id

PENDAHULUAN

Keamanan maritim disebut sebagai kata kunci baru dalam hubungan internasional. Hal ini berkaitan dengan peranan dari kekuatan maritim sebagai instrumen utama dalam suatu kebijakan nasional, yang berkaitan dengan factor-faktor fundamental seperti geografi, ekonomi, politik, teknologi, kekuatan militer dan tujuan strategis maritim suatu negara (VENNAS AIHIL, 2016). Keamanan maritim memiliki cakupan permasalahan yang cukup luas terdiri dari, perselisihan antar batas laut, pergerakan barang dan manusia, pembajakan laut, manajemen sumber daya alam dan eksploitasi sumber daya laut (Angkie, et.al., 2016) Terobosan akan kesadaran keamanan maritim di mulai dari munculnya pembajakan di lepas pantai Somalia pada tahun 2008 dan 2011 (Bueger, 2011). Pasca pembajakan tersebut keamanan maritim mulai menjadi *hotspot* yang dibicarakan dalam dunia internasional.

Pembajakan masuk dalam kategori *Transnational Organised Crime* yang mana agenda dan ruang kriminalitasnya kejahatannya berbeda dengan kejahatan lainnya (UNODC, 2013). Tindakan pembajakan yang terjadi pada suatu Kawasan tentu memberikan kerugian pada negara-negara di Kawasan tersebut bahkan juga berpengaruh di luar Kawasan. Teluk Guinea merupakan salah satu perairan yang dinaungi oleh bajak laut, saat ini Teluk Guinea menjadi perairan yang tengah menjadi sorotan dunia, dikarenakan insiden pembajakan yang terjadi di Teluk Guinea.

Teluk Guinea merupakan perairan yang terbentang dari Senegal hingga Angola. Tepatnya terletak di wilayah paling timur dari Samudra Atlantik Tropis dan mencakup 6.000 km garis pantai. Letak wilayah yang cukup strategis membuat Teluk Guinea memegang peranan penting dalam perdagangan internasional terutama jalur perdagangan

minyak dan gas dari Afrika Barat dan ekspor-import non-energi dari Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Meskipun bukan jalur perdagangan internasional utama, namun Teluk Guinea memegang 25% dari lalu lintas maritim Afrika (CSIS, 2021).

Tidak hanya itu, Teluk Guinea juga mengandung sumber daya alam yang melimpah yang kaya akan sumber daya mineral dan sumber daya kelautan (minyak, berlian, emas dan ikan). Hampir 70% dari produksi minyak Afrika berasal dari wilayah ini. Potensi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan terjadinya peristiwa pembajakan di Teluk Guinea. Pembajakan merupakan permasalahan utama bagi Teluk Guinea, saat ini perairan ini menduduki peringkat 1 dunia dan dijuluki dengan *The New Danger Zone* (Suh I, 2017). Kejahatan pembajakan akhir-akhir ini didominasi oleh pembajakan petro yang dilakukan oleh organisasi terorganisir. Aksi pembajakan ini memicu kerugian yang cukup besar bagi negara-negara sekitar Teluk Guinea serta para investor eksternal. Bahkan tidak tanggung-tanggung kerugian yang mereka alami mencapai USD 818 juta pada tahun 2017 (Olufowobi, 2022).

Pada tahun 2019 dan 2020 pembajakan di perairan ini meningkat sebesar 10%. Dengan insiden penjarahan 84 kapal dan 135 penculikan pelaut. (CSIS, 2021). Kejahatan Terorganisir yang terjadi menjadi ancaman besar bagi Teluk Guinea. Hal ini, kemudian mendapatkan perhatian dari dunia internasional, tak terkecuali Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang sadar akan pentingnya keamanan maritim memberikan bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di perairan ini.

Pada tahun 2014 merupakan kali pertama Uni Eropa terlibat dalam Upaya peningkatan

keamanan maritim Teluk Guinea. Upaya ini dilakukan melalui Uni Eropa Strategi di Teluk Guinea dan merupakan bentuk dukungan dari Uni Eropa terhadap strategi dari negara-negara Kawasan Tejuk Guinea yakni, Yaounde Architecture (EEAS, 2021). Melalui strateginya, Uni Eropa telah melakukan berbagai program, namun dari program-program tersebut belum ada yang dapat disebut efektif. Oleh karena itu, Uni Eropa melakukan evaluasi dan kemudian meluncurkan proyek *Coordinated Maritime Presences* (CMP). Pelaksanaan CMP dilakukan dengan memberikan negara-negara Uni Eropa memberikan asset Angkatan lautnya untuk berpatroli di Teluk Guinea (Novaky, 2017).

Berbagai upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam menyelesaikan isu kejahatan transnasional di Teluk Guinea tentu memiliki kepentingannya. Ho (2006) menyebutkan meningkatnya ancaman transnasional yang terjadi dalam suatu wilayah maritim dalam hal ini Teluk Guinea, maka negara-negara membutuhkan kerangka kerja sama (Ramadhani, et.al., 2019). Negara-negara Uni Eropa bekerjasama di bawah payung Uni Eropa untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di Teluk Guinea yang kemudian kepentingan tersebut disatukan dalam bentuk *collective interest*. Maka dari itu, menarik untuk membahas mengenai kepentingan yang dimiliki Uni Eropa di teluk Guinea melalui strategi *Coordinated Maritime Presences* (CMP) pada tahun 2019-2022.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kajian Pustaka yakni, pertama tulisan dari Arthur A. Stein yang berjudul *Neoliberal Institutionalism* dalam buku karya Christian Reus Smit dan Duncan Snidal. Tulisan ini memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan neoliberal institusionalisme dan mengapa negara-negara semakin membutuhkan Kerjasama dalam penyelesaian suatu isu internasional. Tidak hanya itu, Stein

juga menambahkan sudut pandang teori-teori lain mengenai neoliberal institusionalisme. Dalam tulisannya ini Stein menyebutkan neoliberal institusionalisme memandang optimis Kerjasama antar negara. Hal inilah yang membuat neoliberal institusionalisme dijuluki sebagai idealis yang mempromosikan Kerjasama internasional serta organisasi internasional yang percaya akan peluang kerja sama.

Bagian yang menarik dari tulisan ini adalah Stein memberikan pandangan mengenai bagaimana institusi dapat memberikan solusi terhadap dilemma *self-interest* suatu negara, Ketika mereka berada dalam suatu institusi. Neoliberal institusionalisme sesungguhnya memang percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu negara berdasarkan dari *self-interested*. Namun, negara-negara mulai sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan dari *self-interested* dapat memberikan permasalahan untuk mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk mengkonstruksikan institusi internasional untuk menyelesaikan permasalahan utama mereka. Negara-negara percaya bahwa Ketika mereka membentuk suatu institusi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah mereka akan lebih sedikit.

Literatur kedua yang digunakan penulis adalah *The National Interest Concept in A Globalised International System* karya Rifki Dermawan tahun 2019. Tulisan ini banyak membahas mengenai perubahan arah tatanan nasional dan sistem internasional yang disebabkan globalisasi. Dermawan menyebutkan bahwa penggunaan konsep kepentingan nasional sudah tidak relevan lagi dalam dunia globalisasi ini dalam menjelaskan mengenai dinamika kepentingan yang terjadi dalam negara-negara yang tergabung dalam suatu komunitas kolektif. Hal ini, dikarenakan saat ini pertikaian antar negara secara general telah berkurang. Negara-negara lebih banyak

membentuk suatu korporasi dalam melindungi stabilitas keamanan nasional mereka.

Pasca perang dingin dan pengaruh globalisasi, negara-negara mulai percaya bahwa penting untuk mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan global. Ancaman global menjadi salah satu alasan untuk mereka sadar akan pentingnya membentuk suatu korporasi antara satu sama lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan Bersama yang dilakukan negara-negara dalam suatu institusi merupakan *collective interest*, karena dalam upaya tersebut tidak hanya merepresentasikan kepentingan dari satu negara saja, namun semua kepentingan yang dimiliki oleh negara-negara anggota institusi tersebut. Adapun hasil akhir dari penelitian ini adalah, Dermawan berharap bahwa dunia harus mempertimbangkan relevansi dari kepentingan nasional. Karena, saat ini sistem internasional yang telah dipengaruhi oleh globalisasi menyebabkan konsep kepentingan nasional tidak sesuai untuk menjelaskan kepentingan yang berasal dari suatu kerjasama atau *collective actions*.

Berdasarkan dari kajian Pustaka tersebut, penulis mampu memberikan kebaruan dalam penelitian ini yakni, dalam penelitian ini membahas mengenai kepentingan Uni Eropa di Teluk Guinea melalui strategi *coordinated maritime presences* (CMP) dengan rentang tahun dari 2019-2022 yang kemudian di analisis menggunakan tiga konsep yaitu, konsep neoliberal institusionalisme (*grand theory*), organisasi internasional (*middle theory*), dan *collective interest* (*applied theory*).

Neoliberal institusionalisme merupakan salah satu teori hubungan internasional yang mempromosikan mengenai gagasan Kerjasama antar negar, pemikirannya banyak dipengaruhi Robert Keohanne dan Joseph Nye. Neoliberal Institusional mendukung asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarki dan kompliktual.

Akan tetapi, teori ini juga percaya bahwa dengan bekerjasama negara-negara akan cenderung berdamai. Kerjasama antar negara biasanya diwadahi oleh suatu institusi internasional yang berfungsi sebagai mediator aktor-aktor internasional. Robert Keohanne berpandangan bahwa kerjasama antar negara tidaklah mudah dan dapat menimbulkan ketegangan, namun kerjasama juga memberikan manfaat dari strategi kerjasama (Keohanne, 1984 dalam Stein, 2008).

Neoliberal Institusionalisme percaya bahwa negara-negara memang bertidak sesuai dengan *self-interested* mereka masing-masing, akan tetapi negara juga tetap berpandangan positif terhadap kerangka kerjasama (Keohanne, 1984 dalam Stein, 2008). Negara-negara menyadari bahwa dengan bekerjasama atau membentuk suatu institusi mereka dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah mereka dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya (Stein, 2008). Melalui institusi negara-negara mulai merubah arah pandangan mereka dari kepentingan pribadi kearah kepentingan kolektif, namun bukan berarti mereka kehilangan kepentingan nasionalnya melainkan mendefinisikan kembali kepentingan nasionalnya agar sesuai dengan kepentingan kolektif komunitas (Goodin & Klingemann, 1998).

Dalam hubungan internasional negara bukanlah satu-satunya aktor, akan tetapi terdapat juga peran dari *non-state actor* yang juga dapat berkontribusi dalam politik global, salah satunya organisasi internasional. Organisasi internasional (Archer, 2001) didefinisikan sebagai struktur formal yang berkelanjutan dibentuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan dari dua atau lebih negara-negara berdaulat. Organisasi internasional dalam buku karya Clive Archer "*International Organization*" memiliki tiga peran, pertama, organisasi internasional berperan sebagai

instrument. Instrumen berarti organisasi internasional berperan sebagai alat negara-negara anggotanya untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Kedua, peran organisasi internasional sebagai arena. Organisasi internasional dianggap mampu dalam memberikan wadah bagi negara-negara untuk bekerjasama, berkumpul dan berdiskusi. Terma "arena" berarti bahwa organisasi internasional sebagai tempat yang harus bersifat netral atau tidak memihak pihak manapun. Ketiga, organisasi internasional sebagai aktor yang independent, yang berarti bahwa organisasi internasional dapat bertindak tanpa mendapatkan pengaruh dari eksternal (Archer, 2001). Dalam penelitian ini, Uni Eropa sebagai organisasi internasional menetapkan kebijakan strategisnya *Coordinated Maritime Presences* di Teluk Guinea demi melindungi kepentingannya dalam bidang keamanan, perdagangan dan energi.

Kepentingan dari Uni Eropa tersebut dianalisis menggunakan konsep *collective interest*. Uni Eropa merupakan komunitas kolektif, hal sesuai dengan pernyataan Vadi et al. (2002) di mana setiap organisasi di bentuk secara kolektif yang terdiri dari negara, perilaku, sikap dan hubungan antar negara. Doktrin kepentingan kolektif menagcu pada proposisi bahwa negara-negara bertanggung jawab untuk bergabung dalam suatu pengaturan kolektif yang dibutuhkan dalam kestabilan dan keamanan mereka (Claude, 1969). Hal ini berkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh globalisasi yang meruntuhkan batas-batas negara, sehingga memungkinkan ancaman mengalir secara transnasional dan membutuhkan solusi dari masyarakat global untuk menyelesaikannya (Cabinet, 2008 dalam Dermawan, 2019).

Tindakan untuk melawan ancaman global tentu berdasarkan dari *collective interest*, karena dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan

satu negara, namun melibatkan kolaborasi antar negara. Newman (2004) mendefinisikan *collective interest* sebagai seperangkat factor yang memfasilitasi pemenuhan kepentingan nasional dari negara-negara yang tergabung dalam suatu komunitas kolektif dalam satu kepentingan yang sama. Dalam suatu komunitas kolektif kepentingan nasional negara-negara anggotanya tentu tidak akan sama, sehingga para anggota akan cenderung melakukan negosiasi kepentingan yang mereka miliki agar selaras dengan kepentingan anggota secara umum (Finns & Newman, 2004). Sehubungan dengan pemaparan latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis yang digunakan penelitian ini dibuat dengan maksud untuk menganalisis kepentingan Uni Eropa di Teluk Guinea melalui strategi *Coordinated Maritime Presences* (CMP) pada tahun 2019-2020.

METODE

Berdasarkan dari latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lischman (2013:7) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena dengan cara mengumpulkan, mengorganisasikan dan menginterpretasikan data-data atau informasi yang telah didapat melalui serangkaian observasi terhadap manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena focus pada hubungan sebab-akibat dari fenomena yang diteliti. Dengan jenis penelitian deskritif, penulis mencoba untuk menggambarkan kepentingan yang dimiliki oleh Uni Eropa di Teluk Guinea melalui strategi *Coordinated Maritime Presences* (CMP) dengan menekankan pada *collective interest* dari negara-negara anggota Uni Eropa dalam melakukan upayanya membantu penyelesaian masalah keamanan di Teluk Guinea.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana informasi dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi Pustaka. Metode ini dilakukan dengan mencari data-data melalui buku, jurnal, artikel, berita, dan *website* resmi instansi pemerintahan. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan tujuan untuk memfilter dan memfokuskan data-data yang didapat agar sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif. Miles dan Huberman (1994) membagi Teknik analisis kualitatif dalam tiga bagian yakni, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Salim & Syahrur, 2012).

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan dan perangkuman data agar lebih mudah untuk dipahami penulis. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah data-data yang didapat yang sesuai dengan topik yakni data-data mengenai kepentingan-kepentingan Uni Eropa di Teluk Guinea dan data-data pendukung mengenai implementasi CMP serta data-data pendukung argumentasi untuk kepentingan kolektif Uni Eropa sebagai suatu organisasi internasional. Penyajian data, dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Terakhir, penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan dengan rumusan masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Keamanan Teluk Guinea

Teluk Guinea merupakan perairan regional dan termasuk bagian dari Samudra Atlantik Tropis Timur di lepas pantai Afrika Barat. Perairan ini terbentang dari Senegal hingga Angola yang mencakup 6.000 km garis pantai. Wilayah Teluk Guinea berbatasan dengan negara-negara

Guinea-Conakry di utara dan daerah pesisir Nigeria, Ghana, Sao Tome dan Principe, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, Liberia, Benin, Togo, Republik Demokratik Kongo, dan Angola di selatan. Teluk Guinea juga melingkupi anak sungai Volta dan Niger (Basist, 2022).

Pada Yaounde Architecture wilayah perairan Teluk Guinea terbagi dalam lima zona yakni, Zona A (Angola, dan *Democratic of Congo*), zona B (Gabon, dan Congo), zona D (Cameroon, Guinea Khatulistiwa, Ghana, Sao Tome dan Principe), zona E (Benin, Niger, Nigeria, Togo), Zona F (Ghana, Burkina Faso, Pantai Gading, Guinea, Liberia, dan Sierra Leone), dan terakhir zona G (Tanjung Verde, Gambia, Guinea-Bisau, Mali dan Senegal) (EU GoGIN, n.d). Beberapa negara tersebut tergabung dalam *Gulf of Guinea Cimmission* (GGC) yang dibentuk pada 3 Juli 2001 dengan tujuan menciptakan rasa saling percaya, perdamaian dan keamanan serta mempromosikan agenda mengenai eksploitasi sumber daya di kawasan Teluk Guinea antara negara-negara anggotanya (maritimafrica, 2020).

Teluk Guinea merupakan salah satu kawasan yang penting bagi dunia, hal ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang terkandung didalamnya terutama hidrokarbon. Nigeria sebagai salah satu negara di Kawasan Teluk Guinea yang terkenal sebagai produsen minyak terkemuka di Benua Afrika. Namun, dalam dua decade terakhir negara-negara lain di Kawasan ini seperti Guinea Khatulistiwa, DRC, Ghana dan Angola juga mulai mengembangkan potensi energinya melalui ekstraksi minyak lepas pantai (Basist, 2022).

Dilihat dari aspek ekonomi dan strategi, Teluk Guinea menjadi salah satu rute utama dalam perdagangan regional dan perdagangan internasional terutama untuk zona transportasi yang mengangkut minyak dan

gas serta barang-barang dari Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Kawasan ini juga menjadi titik akses antara Amerika dan Eropa melalui jalur Atlantik (Norbert, 2021). Hal inilah, yang menjadi alasan Teluk Guinea dianggap sebagai perairan yang potensial dalam melaksanakan kejahatan transnasional, yang tentunya memberikan dampak yang besar bagi keamanan maritim dan berdampak pada pengembangan ekonomi (EEAS, 2021).

Pembajakan dan perampokan bersenjata merupakan permasalahan utama bagi Teluk Guinea serta menjadi isu global. Seiring dengan perkembangan zaman perompak bukan lagi tentang bandit dengan senjata sederhananya, namun telah bereinkarnasi menjadi perompak dengan senjata dan transportasi yang jauh lebih canggih. Teluk Guinea menjadi perairan nomor satu dengan kasus pembajakan terbanyak di dunia. Pada tahun 2020 menjadi puncak dari tingginya insiden pembajakan di Teluk Guinea dengan angka 84 insiden dan berdasarkan dari *International Maritime Bureau* kasus pembajakan yang terjadi di Teluk Guinea tergolong berbahaya karena 80% dari insiden yang terjadi melibatkan penyerang bersenjata (Marineinsight, 2021).

Uni Eropa dalam Keamanan Maritim Teluk Guinea

Uni Eropa pertama kali terlibat dalam penyelesaian kasus keamanan maritim Teluk Guinea pada tahun 2014. Melalui "*The EU Maritime Security Strategy Action Plan: The EU Gulf of Guinea Strategy and Action Plan*", EU memberikan dukungannya terhadap strategi yang telah dilakukan oleh negara-negara Kawasan Teluk Guinea, yakni "*Yaounde Architecture*" yang disepakati pada Juni 2013 dalam *Yaounde Heads of State Summit* oleh Afrika Economic Community of West African States (ECOWAS), *The Economic Community of Central*

African States (ECCAS) dan *Gulf of Guinea Commission* (GGC) (EEAS, 2014).

Yaounde Architecture merupakan komitmen yang kuat antara negara-negara kawasan Teluk Guinea dibentuk berdasarkan kesadaran negara-negara Afrika Barat dan Afrika Tengah akan pentingnya perlindungan kawasan dan kejahatan maritim. KTT Yaounde juga disebut sebagai simbol dari komitmen yang kuat antara negara-negara dan organisasi regional di kawasan Teluk Guinea untuk bekerja sama dengan mitra internasional dalam mengembangkan keamanan maritim regional yang lebih komprehensif. KTT inilah yang kemudian menjadi titik awal dari peluang Uni Eropa untuk masuk dalam strategi keamanan kawasan Teluk Guinea. Uni Eropa akan terlibat melalui pendekatan terintegrasi berkaitan dengan masalah tata kelola dan semua risiko serta tantangan keamanan yang meliputi darat, dan laut, mengatasi segala aspek kejahatan terorganisasi transnasional di wilayah maritim, sebagaimana yang diatur dalam kode etik Yaounde. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga menangani penyebab yang mendasari isu keamanan maritim dan mempromosikan perdamaian regional, keamanan stabilitas, *good government* dan pembangunan (EEAS, 2014).

Melalui Strategi *action plan*, Uni Eropa membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ancaman keamanan maritim, memperkuat hubungan kerjasama antara aktor nasional, regional dan internasional serta mempromosikan kemakmuran ekonomi dan komunitas pesisir yang Tangguh. *Action plan* EU dalam kawasan Teluk Guinea terbagi menjadi beberapa program, salah satunya *Coordinated Maritime Presences* (CMP) yang merupakan program lanjutan dari beberapa program sebelumnya. CMP merupakan program yang sebelumnya masuk dalam agenda yang dipresentasikan oleh Federica Mogherini pada 29 Agustus 2019

yakni, "Beberapa negara Uni Eropa memiliki kepentingan sama dalam satu wilayah geografis yang sama, dikarenakan mereka mengalami ancaman dan resiko yang sama. Kerjasama tersebut diperkuat dalam beberapa poin yaitu, a. Wilayah Karibia, Spanyol, Prancis, Belanda dan Inggris memerangi permasalahan narkoba dan membantu penduduk atas bencana yang terjadi, b. Di Teluk Guinea, Denmark, Spanyol, Portugal, Prancis dan Inggris bersama dengan Italia dan Jerman memerangi isu pembajakan, bandit dan perdagangan illegal, c. Wilayah Tanduk Afrika dan Persia memerangi pembajakan, perdagangan, terorisme dan penolakan akses dengan kontrol Selat di Cekungan Eropa (Baroe& Marty, 2022).

CMP dilaksanakan dengan Uni Eropa memastikan kehadiran berkelanjutan melalui pelaksanaan patroli dari kapal-kapal Angkatan laut negara-negara Uni Eropa. Denmark, Spanyol, Prancis, Italia dan Portugal merupakan lima negara perwakilan Uni Eropa yang ikut berkontribusi dalam proyek CMP. Unit-unit Angkatan laut dari kelima negara tersebut akan mengirimkan informasi ke MAICC terkait dengan aktivitas pembajakan di Teluk Guinea serta mereka akan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan multilateral di wilayah perairan ini (EEAS, 2020).

Collective Interest Uni Eropa di Teluk Guinea

Collective Interest merupakan konsep yang mengacu pada tujuan dan sasaran bersama suatu kelompok atau organisasi internasional. Konsep ini didukung dengan beberapa factor yakni, nilai bersama, ancaman bersama, manfaat ekonomi bersama dan politik bersama (Dalley, 1996). Dalam penelitian ini penulis menggunakan *collective interest* sebagai salah satu konsep untuk menganalisis kepentingan yang dimiliki Uni Eropa di Teluk Guinea

melalui strategi CMP. Penggunaan konsep ini juga didasari oleh Uni Eropa sendiri merupakan organisasi internasional yang memiliki kepentingan kolektif yang tercermin dalam ambisi Uni Eropa dalam kemakmuran, perdamaian dan kelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari tujuan global (EEAS, 2014). Kepentingan kolektif Uni Eropa juga ada dalam *collective action* di Teluk Guinea melalui CMP.

Coordinated Maritime presences (CMP) merupakan bagian dari Upaya Uni Eropa untuk lebih meningkatkan eksistensinya dalam bidang keamanan maritim. CMP dilaksanakan dengan gagasan negara-negara Uni Eropa yakni, Spanyol, Italia, Portugal, Denmark dan Prancis akan secara kolektif melaksanakan tugas tambahan di bawah payung Uni Eropa untuk berkontribusi dengan memberikan Angkatan lautnya berpatroli di perairan Teluk Guinea (Novaky, 2017). Aktivitas CMP dilaksanakan berdasarkan pembagian waktu tugas yaitu, Denmark akan bertugas selama delapan bulan pertama, dilanjutkan dengan Spanyol selama tujuh setengah bulan, Prancis delapan bulan, Italia delapan bulan dan Portugal selama tiga setengah bulan (EEAS, 2022). Kerjasama yang ini tentu didasari oleh kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Hal ini sesuai dengan asumsi dari neoliberal institusionalisme yang menyebutkan negara-negara memang bertindak sesuai dengan *self-interested* mereka, untuk mencapai kepentingannya negara-negara akan memilih untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingan mereka yang disatukan dalam suatu *collective interest*.

Upaya yang dilaksanakan oleh kelima negara tersebut juga didasari oleh ancaman bersama yakni ancaman akan keamanan maritim Teluk Guinea yang kemudian memengaruhi kepentingan nasional negara tersebut yakni,

kepentingan keamanan, perdagangan dan energi.

Kepentingan Keamanan

Kepentingan keamanan menjadi kepentingan utama Uni Eropa di kawasan Teluk Guinea. Kepentingan keamanan sendiri merupakan akar dari kepentingan-kepentingan Uni Eropa pada semua sektor. Hal ini juga berkaitan dengan kepentingan Uni Eropa dalam meningkatkan citranya sebagai aktor maritim yang handal. Keseriusan EU akan keamanan maritim dibuktikan dalam *Global Strategy EU 2016*, sebagai kunci utama dari maritim dalam hubungannya dengan kepentingan komersial, keamanan dan politik (Latici, et al, 2021). Strategi keamanan maritim menjadi salah satu instrument Uni Eropa dalam melindungi kepentingannya yang berkaitan dengan wilayah perairan. Ketertarikan EU akan keamanan maritim juga berkaitan dengan perannya sebagai kekuatan perdagangan global, di mana 90% perdagangan eksternal dan 40% perdagangan internal EU bergantung pada sector laut (Latici et al, 2021). Kebebasan akan aktivitas perdagangan serta kapasitas eksploitasi sumber daya di suatu wilayah maritim tentunya akan terpengaruh dengan stabilitas keamanan maritim sekaligus juga berpengaruh pada kepentingan Uni Eropa di wilayah tersebut, dalam hal ini Teluk Guinea (Norbert, 2017).

CMP menjadi salah satu strategi keamanan maritim Uni Eropa yang disebut efektif dalam mengatasi permasalahan keamanan maritim di Teluk Guinea. Keberhasilan ini juga sekaligus menjadi ajang pembuktian citra Uni Eropa sebagai aktor keamanan maritim yang handal dengan memberikan keterlibatan operasional yang lebih besar, memastikan kehadiran dan jangkauan maritim yang berkelanjutan pada wilayah kepentingan maritim (sebagaimana ditetapkan oleh Dewan) serta mempromosikan

kerja sama dan kemitraan internasional pada kawasan maritim (Novaky, 2017). Proyek CMP juga diharapkan mampu menjadi kekuatan utama Uni Eropa dalam menyebarkan kelima asset Angkatan lautnya secara teratur dan bersamaan (UNSC, 2022). Gagasan akan CMP juga merupakan instrument Uni Eropa dalam meningkatkan kehadiran dan pengaruh politiknya pada bidang keamanan maritim. Aktivitas CMP juga dianggap berpotensi membuka peluang untuk peningkatan kerja sama dengan aktor-aktor kunci di kawasan Teluk Guinea.

Aktivitas CMP di Teluk Guinea juga dipercaya dapat membuka peluang bagi peningkatan kerja sama dengan aktor kunci di wilayah perairan Teluk Guinea, seperti negara-negara di dalam Kawasan tersebut dan organisasi-organisasi regional Afrika Barat dan Afrika Tengah (Suri, 2023). *International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre* (IMB PRC) menyebutkan bahwa proyek CMP memberikan dampak positif dalam penyelesaian kasus keamanan maritim Teluk Guinea. Insiden kejahatan transnasional yang terjadi terus mengalami penurunan dari sejak diluncurkannya CMP di Teluk Guinea pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah insiden menurun sebesar 46% dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Disamping itu, laporan dari Berdasarkan dari *Council of the European Union* (2022) menyebutkan bahwa jumlah insiden perompakan dan pembajakan secara konsisten mengalami penurunan sebesar 50% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 (EEAS, 2022).

Tidak hanya tentang insiden pembajakan, isu keamanan maritim di Teluk Guinea juga mendorong berkembangnya aktivitas penyelundupan narkoba dan perdagangan senjata illegal. Afrika Barat sendiri merupakan Kawasan suaka bagi perdagangan narkoba yang berasal dari Amerika Latin menuju Eropa.

Jenis narkoba yang banyak diselundupkan melalui jalur ini adalah kokain (Karamperidis, 2022). Kokain banyak digunakan sebagai obat perangsang yang umum digunakan di Eropa (EMCCDA, 2022). Dilihat dari aspek bisnis perdagangan kokain ke Uni Eropa jauh lebih menguntungkan daripada ke Amerika, hal ini dikarenakan harga kokain yang lebih tinggi Amerika Serikat kokain dihargai US\$ 28.000, sedangkan di negara-negara Uni Eropa berharga sekitare US\$ 40.000 dan US\$ 80.000 (McDermot, et.all, 2021). Berkaitan dengan perdagangan kokain inilah juga menjadi kepentingan Uni Eropa. Kejahatan transnasional termasuk perdagangan narkoba yang terus meningkat di Uni Eropa menjadi kekhawatiran Uni Eropa. Karena juga memberikan dampak pada Uni Eropa. Kekhawatiran ini juga disebutkan oleh, Direktur Eksekutif Europol, Catherine De Bolle yang menekankan bahwa perdagangan obat-obatan terlarang seperti narkoba terus mendominasi kejahatan serius di Uni Eropa. Hampir 40% dari jaringan kriminal yang beroperasi di tingkat internasional aktif dalam perdagangan narkoba (EMCCDA, 2022).

Kepentingan Perdagangan Uni Eropa

Kepentingan perdagangan Uni Eropa di Teluk Guinea berkaitan dengan aktivitas pelayaran yang terjadi di Teluk Guinea. Dilihat dari aspek geografi Teluk Guinea memang memiliki keunggulan yang komparatif berkaitan dengan pasokan minyak dan gas. Kawasan Teluk Guinea terbentang dari garis pantai yang Panjang dan kaya akan sumber daya alam. Aktivitas perdagangan yang dilakukan di Teluk Guinea sebagian besar bermitra dengan Uni Eropa. Terdapat rata-rata 30 kapal negara-negara Uni Eropa yang aktif berlayar di perairan ini setiap harinya (EEAS, 2014). Salah satu negara Uni Eropa yang beraktivitas di Teluk Guinea adalah Denmark. Kapal-kapal Denmark beroperasi untuk perdagangan

maritim sebesar 40% dan 5% ekspor Denmark yang bernilai DKK 9,5 miliar ke wilayah Afrika Barat melalui perusahaan pelayaran Maers (Danso & Pappoe, n.d).

Keamanan maritim Teluk Guinea sangat penting bagi Uni Eropa, hal ini juga dapat dilihat dari kapal-kapal Uni Eropa yang mengalami insiden pembajakan. Salah satunya adalah kapal-kapal dari perusahaan pelayaran Denmark. Pada November 2020 *TORM ALEXANDRA* mengalami insiden pembajakan, *MAERSK CADIZ* diserang oleh pembajak pada Desember 2020 dan Januari 2021 *MAERSK CARDIFF* mengalami pembajakan di Nigeria Selatan (DanishShipping, 2021). Beberapa perusahaan pelayaran yang berasal dari Uni Eropa masuk dalam lima besar perusahaan yang banyak melakukan aktivitas di Teluk Guinea. Perusahaan tersebut adalah Maersk Line (Denmark), CMA-CGM (Prancis), dan Nile Dutch (Belanda) (UNCTAD, 2022).

Tiga perusahaan Maersk Line, MSC Shipping dan CMA-CGM meningkatkan pangsa pasar mereka di Teluk Guinea sebesar 20% yakni dari 54% di tahun 2010 menjadi 74% pada tahun 2020. Maersk Line sendiri beroperasi untuk 1.124.800 TEU di WCA pada tahun 2020 dan disebut-sebut perusahaan terdepan di benua Afrika. CMA-CGM mengirimkan 892.500 TEU dan Nile Dutch/Hapag Lloyd sebesar 334.200 (UNCTAD, 2022).

Aktivitas pelayaran yang dilakukan Uni Eropa di Teluk Guinea sebagian besar dilaksanakan dengan tujuan ekspor-impor. Perdagangan Uni Eropa di wilayah ini dapat dicerminkan dengan hubungan perdagangan Uni Eropa dengan Afrika Barat. Uni Eropa sendiri merupakan pangsa pasar terbesar bagi ekspor Afrika Barat untuk produk-produk agribisnis, perikanan, tekstil dan makanan. Afrika Barat juga mengimpor produk-produk bahan bakar, makanan, mesin, bahan kimia dan obat-obatan

dari Uni Eropa (European commission, n.d). Hubungan perdagangan antara kedua kawasan tersebut juga diperkuat dengan adanya kerjasama *The Economic Partnership Agreement* (EPA) yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama dan *cover goods* (European commission, 2020).

Kepentingan Energi Uni Eropa

Sumber daya alam yang terkandung dalam Teluk Guinea menjadikannya salah satu wilayah penting bagi dunia. Sumber daya energi merupakan salah satu elemen penting yang dimiliki perairan ini. Hal ini berkaitan dengan peranan dari energi itu sendiri sebagai salah satu sumber kebutuhan dasar dari setiap kehidupan manusia dalam berbagai bidang (Kurnianta, et.al., 2017). Teluk Guinea diperkirakan menyimpan 14.495 miliar barel minyak mentah dan cadangan gas yang menjadi sumber daya penting bagi perekonomian. Hal inilah yang membuat Teluk Guinea menjadi incaran aktor eksternal seperti Amerika dan Uni Eropa serta perusahaan minyak multinasional seperti, ExxonMobil, Royal Dutch Shell (Inggris-Belanda, British Petroleum (BP), Chevron Texaco dan French Total sebagai ladang investasi (Danso&Pappoe, n.d). Nigeria, Angola, Guinea Khatulistiwa, Cameroon, Republik Kongo, Gabon dan Chad merupakan negara-negara di kawasan Teluk Guinea produsen minyak dan di gadang-gadang menjadi pemasok utama energi (Mane. 2005).

Teluk Guinea merupakan kawasan pertama ditemukannya minyak di Afrika Barat tepatnya pada tahun 1956 di Delta Niger. Dan sejak tahun 2000-an kawasan Teluk Guinea telah menjadi pemasok lebih dari 55 miliar atau 5% dari minyak dunia dan 60% produksi minyak di wilayah sub-sahara (Najoui et, al. 2022). Melalui CMP Uni Eropa melakukan

perlindungan terhadap kepentingan energinya di Teluk Guinea.

Collective Interest Uni Eropa di teluk Guinea ada pada bidang energi. Energi Uni Eropa banyak bergantung pada energi dari Rusia. Akan tetapi, Uni Eropa mulai mencari *alternative supplier energy* dan Teluk Guinea dianggap mampu menjadi kawasan alternatif energi Uni Eropa dibandingkan dengan kawasan timur tengah. Karena Teluk Guinea dirasa lebih menguntungkan diteropong dari kedekatan geografi dan akses laut yang lebih mudah (European Parliament, 2020). *Council European Union* tahun 2014, menyebutkan bahwa ketergantungan energi Uni Eropa di Teluk Guinea dilihat dari EU mengimport 13% minyak dan 4% gas dari Teluk Guinea. Nigeria, Angola, Guinea Khatulistiwa dan Gabon merupakan supplier minyak mentah dan natural gas didapat Uni Eropa dari Nigeria (EEAS, 2014).

Kelebihan dari Teluk Guinea sendiri dalam hal ini Nigeria dapat mengimport gas tanpa strategi *pipelines* Nigeria serta disebut sebagai mitra gas utama Eropa. Tahun 2021, Nigeria mengimport sekitar 14% *Liquefied Natural Gas* LNG ke Uni Eropa, dilanjutkan pada tahun 2022 juga mengimpor dengan volume yang sama. Pabrik Nigeria LNG *Limited* dioperasikan oleh Nigerian *National Petroleum Corporation* dan tiga mitra internasional (Total Energies, Shell dan ENI) (ISPI, 2022). Tidak hanya itu, berdasarkan dari data Eurostat, sebesar 3% *crude oil* Uni Eropa berasal dari Nigeria (Eurostat, 2020) dan tahun 2022 Nigeria mengimpor *crude oil* senilai US\$ 21, 97 miliar (tradingeconomic, 2022).

PENTUP

Berdasarkan dari paparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepentingan yang dimiliki Uni Eropa di Teluk Guinea dalam upaya menerapkan strategi *Coordinated*

Maritime Presences (CMP) yang dibedah menggunakan konsep *collective interest* terpusat pada kepentingan keamanan yang kemudian berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan energi. Aktivitas kejahatan transnasional di Teluk Guinea memberikan pengaruh bagi kepentingan-kepentingan dari negara-negara Uni Eropa. *Coordinated Maritime Presences* merupakan strategi Uni Eropa yang dianggap mampu untuk melindungi kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya yakni Spanyol, Italia, Denmark dan Prancis yang kemudian kepentingan tersebut dipersatukan dalam bentuk *collective interest*.

Kepentingan keamanan sendiri merupakan akar dari kepentingan kolektif Uni Eropa di Teluk Guinea. Hal ini dikarenakan, keamanan Teluk Guinea adalah agenda utama demi mencapai kepentingan ekonomi dan energi Uni Eropa. Kepentingan keamanan Uni Eropa juga berkaitan dengan upaya Uni Eropa dalam meningkatkan citranya sebagai organisasi internasional yang handal dan Tangguh dalam hal keamanan maritim. Tidak hanya itu, kepentingan keamanan juga berhubungan erat dengan aktivitas penyelundupan narkoba jenis kokain dari Afrika Barat menuju Eropa. Kepentingan ekonomi Uni Eropa berkaitan dengan aktivitas pelayaran dan ekspor-impor Uni Eropa dengan negara-negara kawasan Teluk Guinea. Perusahaan pelayaran negara-negara Uni Eropa masuk dalam jajaran lima besar perusahaan pelayaran yang beroperasi di Teluk Guinea dengan peningkatan pangsa pasar sebesar 20% dari tahun 2010 sampai 2020. Selanjutnya, isu pembajakan di Teluk Guinea menjadi ancaman utama bagi kerugian kepentingan energi Uni Eropa, di mana sebagian besar target pembajakan adalah kapal-kapal yang mengangkut minyak dan gas. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kepentingan energi Uni Eropa untuk menjadikan Teluk

Guinea sebagai *alternative supplier energy* Uni Eropa.

Melanjutkan dari penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi kepada penulis lain yang tertarik dengan topik ini untuk membahas lebih lanjut mengenai evaluasi proyek *Coordinated Maritime Presences* (CMP) di Teluk Guinea dengan rentang waktu tahun 2019-2024 mengingat proyek CMP yang diperpanjang oleh Uni Eropa di Teluk Guinea hingga tahun 2024.

Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). London: Routledge.
- Angkie, N., Priadarsani, N., & Prameswari, A. (2016). Kepentingan Keamanan Nasional Australia Dalam Pelaksanaan Kerjasama *Defence Cooperation* Program di Timor Leste Tahun 2002-2012. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(1). Terdapat pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/21809>
- Baroe, J CF. Marty, W LV. (2022). *Europe, Cooperating For A Naval Ambition*. France: Centre d'études stratégiques de la Marine
- Bueger, C. (2015). *What is Maritime Security*. University of Copenhagen: Marine Policy. Vol.53.
- Claude, I. L. (1969). The Collectivist Theme in International Relations. *International Journal*, 24(4), 639-656. <https://doi.org/10.1177/002070206902400402>
- CSIS. (2021, February 1). *A Transatlantic Approach to Address Growing Maritime Insecurity in The Gulf of Guinea*. Terdapat pada <https://www.csis.org/analysis/transatlantic-approach-address-growing-maritime-insecurity-gulf-guinea>. Diakses pada 28 September 2022.
- Dalley, G. (1996). *Ideologies of Caring: Rethinking Community and Collectivism*. Basingstoke: Macmillan Education.
- Danso, K. Pappoe, S.A. (n.d). *Mapping Maritime Actors Under The Yaounde Protocol: Establishing Mandates, Interrelationships, Gaps and Prospects*. KAIPTC.
- Dermawan, R. (2019). *The National Interest Concept In A Globalised International System*. Department of International Relations: Andalas University.
- EEAS. (2014). *EU Strategy on The Gulf of Guinea*. Brussels: Foreign Affairs Council Meeting.

- EEAS. (2021). Council Conclusions Launching The Pilot Case of The Coordinated Maritime Presences Concept in The Gulf of Guinea. Brussels: Council of The European Union.
- EEAS. (2022). Review of The Pilot Case of The Coordinated Maritime Presences Concept in The Gulf of Guinea. Brussels: Council of The European Union.
- EMCDDA. (2022). Europe's Changing Role in Expanding Cocaine and Methamphetamine Markets: 2022 EU Drug Markets Analyses From The EMCDDA and Europol. Terdapat pada https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/5/eu-drug-markets-cocaine-and-methamphetamine_en. Diakses pada 11 Mei 2023.
- European Parliament. (2020). Piracy in The Gulf of Guinea: EU and international action. Terdapat pada [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649333/EPRS_BRI\(2020\)649333_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649333/EPRS_BRI(2020)649333_EN.pdf). Diakses pada 23 Desember 2022.
- EU GoGIN. (n.d). Yaounde Architecture. Terdapat pada <https://www.gogin.eu/en/yaounde-architecture/>. Diakses pada 26 September 2022.
- Goodin & Klingemann. (1998). A New Handbook of Political Science. New York, Oxford University Press
- ISPI. (2022). Nigeria's Gas Ambition in The European Energy Crisis: High Goals and Practical Realities. Terdapat pada <https://www.ispionline.it/en/publication/nigerias-gas-ambitions-european-energy-crisis-high-goals-and-practical-realities-36554#:~:text=Even%20without%20any%20pipeline%20connections,th%20largest%20in%20the%20world>. Diakses pada 3 Maret 2023.
- Kurnianta, M., Fasisaka, I., & Nugraha, A. (2017). Pengejaran Kepentingan Nasional di Bidang Energi Oleh Pemerintah Turki Melalui Kerjasama Dengan Iran Tahun 2002-2009. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(1). Terdapat pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/27626>
- Latici, et al. (2021). Charting a Course Through Stormy Waters: The EU as Maritime Security Actor. EPRS
- Lichtman, M. (2013). Qualitative Research in Education: A User's Guide (Third Edition). Los Angeles, LA: Sage Publications, Inc.
- Mane, D C. (2005) Emergence of The Gulf of Guinea in The Global Economy: Prospects and Challenges. Africa: IMF Working Paper
- Maritimafrica. (26 Oktober 2020). Gulf of Guinea Commission (GGC). Terdapat pada <https://maritimafrica.com/en/gulf-of-guinea-commission-ggc/>. Diakses pada 13 Juni 2023
- Marineinsight. (20 Agustus 2021). Gulf of Guinea Kidnappings Makes 95% of 2020 Global Piracy Attacks. Terdapat pada <https://www.marineinsight.com/shipping-news/gulf-of-guinea-kidnappings-makes-95-of-2020-global-piracy-attacks/>. Diakses pada 19 November 2022
- Najoui, et al. (2022). Oil Slicks in The Gulf of Guinea- 10 Years of Envisat Advanced Synthetic Aperture Radar Observations. Earth System Science Data.
- Newman, D. G. (2004). Collective Interests and Collective Rights. *The American Journal of Jurisprudence*, 49(1), 127-163. doi:10.1093/ajj/49.1.127
- Nováky, N. (2022). The Coordinated Maritime Presences concept and the EU's naval ambitions in the Indo-Pacific. *European View*, Vol. 21(1), 56-65. <https://doi.org/10.1177/17816858221089871>
- Rahmadhani, L., Fasisaka, I., & Widya Nugraha, A. (2019). Kerja Sama Trilateral Pengamanan Maritim Filipina, Malaysia, Indonesia di Laut Sulu Tahun 2014-2016. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Internasional)*, 1(1). Terdapat pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/46417>
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan. Bandung: Citapustaka Media
- Stein, A. A. (2008). Neoliberal Institutionalism dalam Smith & Snidal. (2008). *The Oxford Handbook of International*. New York: Oxford University Press.
- Suri, M. (2023). Explaining EU Maritime Security Cooperation Through The Coordinated Maritime Presences Tool. Finabel- The European Army Interoperability Centre
- UNCTAD. (2022). Concentration of Containerized Shipping and Handling Service: The Case of The Dakar-Luanda Port Range. Terdapat pada <https://unctad.org/news/transport-newsletter-article-no-98-fourth-quarter-2022>. Diakses pada 29 Maret 2023
- UNODC. (2013). Combating Transnational Organized Crime Committed at sea. United Nations.

- UNSC. (2022). Piracy, Armed Robbery Declining in Gulf of Guinea, But Enhanced National, Regional Efforts Needed for Stable Maritime Security, Top Officials Tells Security Council. Terdapat pada <https://press.un.org/en/2022/sc15113.doc.htm>. Diakses pada 10 Mei 2023.
- Vadi et.al. (2002). Collectivism and Its Consequences For Organizational Culture. Faculty of Economics and Business Administration. University of Tartu.
- VENNAS AIHII. (2016). Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Hubungan Internasional. Makasar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin Bersama PP AIHII.